

Peran Komunitas Uluwatu dalam Menghadapi Komersialisasi

Ni Made Ayundha Dyah Maharani¹, Ni Luh Yulyana Dewi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pendidikan Nasional

ayundhadyh19@gmail.com¹, yulyanadewi@undiknas.ac.id²

ABSTRACT

The phenomenon of tourism commercialization in the Pura Luhur Uluwatu area highlights a tension between economic interests and the preservation of sacred cultural values. The temple, which serves as a Hindu place of worship as well as a popular tourist destination, presents significant challenges for the local community in maintaining a balance between religious values and the demands of modern tourism. This study aims to analyze the role of the Uluwatu community in addressing tourism commercialization pressures and to explore how traditional societies preserve cultural values through local wisdom and inherited social systems. The research employs a literature review method by examining relevant academic sources such as journals, books, and research reports on cultural commercialization, community participation, and sustainable tourism management in Bali. The findings reveal that the Uluwatu community plays a vital role in protecting the sanctity of the area through the enforcement of awig-awig (customary law), social monitoring, and participatory communication among residents to balance economic and spiritual interests. Moreover, the active involvement of the government, tourism operators, and visitors is crucial in promoting ethical and sustainable tourism management in this sacred area.

Keywords: commercialization, sustainable tourism, Uluwatu community

ABSTRAK

Fenomena komersialisasi pariwisata di kawasan Pura Luhur Uluwatu menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai sakral budaya lokal. Pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu sekaligus destinasi wisata populer menghadirkan tantangan besar bagi komunitas adat dalam menjaga keseimbangan antara nilai religius dan tuntutan ekonomi pariwisata modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas Uluwatu dalam menghadapi tekanan komersialisasi pariwisata serta bagaimana masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai budaya melalui kearifan lokal dan sistem sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian mengenai komersialisasi budaya, partisipasi komunitas, dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Uluwatu memainkan peran penting dalam menjaga kesucian kawasan melalui penerapan awig-awig, pengawasan sosial, serta komunikasi partisipatif antarwarga untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan spiritual. Selain itu, peran aktif pemerintah, pelaku pariwisata, dan wisatawan juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang beretika dan berkelanjutan di kawasan suci tersebut.

Kata kunci: komersialisasi, komunitas Uluwatu, pariwisata berkelanjutan

PENDAHULUAN

Transformasi kemajuan teknologi dan komunikasi telah mendorong perkembangan dunia termasuk Indonesia, pemerintah Indonesia memandang sektor

pariwisata sebagai salah satu pilar strategis yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan pembangunan nasional (Mudana, 2018). Pariwisata Bali sudah sejak lama menjadi salah satu ikon utama Indonesia di mata dunia, Bali yang terkenal dengan keindahan alam, kekayaan budaya, serta spiritualitas masyarakatnya menjadikan pulau Bali sebagai destinasi pariwisata yang unggulan yang menawarkan keseimbangan antara hiburan dan nilai nilai religius.

Fenomena yang muncul di kawasan Pura Luhur Uluwatu menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dan pelestarian nilai sakral budaya lokal. Pura Luhur Uluwatu tidak hanya menjadi tempat ibadah umat Hindu, tetapi juga destinasi wisata populer dengan pertunjukan Kecak Dance, panorama tebing laut, dan berbagai fasilitas wisata yang terus dikembangkan. Aktivitas wisata ini membawa manfaat ekonomi signifikan, baik bagi masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Namun, di sisi lain, komersialisasi yang berlebihan berpotensi mengikis dan mengubah makna budaya menjadi sekadar komoditas ekonomi. Komunitas adat, yang berlandaskan pada sistem desa pekraman dan nilai Tri Hita Karana, memiliki kewenangan sosial dan moral untuk mengatur tata ruang, perilaku wisatawan, dan aktivitas komersial di wilayahnya. Melalui awig-awig(hukum adat), kegiatan adat, dan pengawasan bersama, masyarakat berupaya mempertahankan batas-batas kesakralan pura dari tekanan pasar dan pembangunan fisik (Wibawa et al., 2019). Namun, dinamika modernisasi dan kebutuhan ekonomi membuat peran tersebut tidak selalu mudah dijalankan. Masyarakat dihadapkan pada dilema antara menjaga kesucian budaya dan memenuhi kebutuhan ekonomi akibat meningkatnya biaya hidup di daerah wisata.

Problematika yang juga menjadi sorotan public dalam aktivitas komersial adalah tentang moral pengaturan tata ruang untuk menjaga daerah pariwisata akibat dampak lingkungan yaitu keretakan tebing Pura yang juga merupakan daerah kawasan suci dan pariwisata terjadi sehingga dalam hal tersebut memunculkan peran daripada komunitas uluwatu dalam menghadapi komersialisasi yang berlebihan. Sejalan dengan temuan Lee dkk. (2017) menunjukkan bahwa berbagai aspek resiliensi komunitas termasuk dukungan sumber daya, hubungan sosial antarwarga, serta komunikasi dengan pemimpin lokal berperan penting dalam membangun dan menjaga ketahanan individu ketika terjadi bencana.

Partisipatif berasal dari kata partisipasi yang merujuk pada pengertian peran dalam sebuah kegiatan atau keikutsertaan. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan sebuah keputusan masyarakat sebagai individu yang melibatkan aktivitas komunikasi di dalamnya, Komunikasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara individu dengan masyarakat dan pemerintah dengan masyarakat dalam pelibatan partisipan dan penentuan sebuah keputusan bersama (Dewi & Nulul, 2018). Oleh karena itu Komunitas adat/uluwatu sebagai masyarakat yang berperan dalam menghadapi tekanan komersialisasi yang terjadi dan upaya daripada mempertahankan pariwisata yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan tujuan untuk menganalisis peran komunitas Uluwatu dalam menghadapi komersialisasi pada objek wisata Pura Luhur Uluwatu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu komersialisasi budaya, peran masyarakat adat, serta pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di kawasan Uluwatu, serta bagaimana komunitas lokal berperan dalam menjaga keseimbangan antara nilai sakral dan kepentingan pariwisata. Dalam konteks ini, subjek penelitian tidak berupa individu, melainkan berbagai sumber ilmiah yang relevan — seperti artikel jurnal, buku akademik, dan laporan penelitian — yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan membahas topik terkait pelestarian budaya, komersialisasi, serta partisipasi komunitas lokal di destinasi wisata spiritual. Kriteria inklusi literatur dalam penelitian ini ditetapkan secara spesifik untuk memastikan relevansi dan ketepatan analisis, yaitu: (1) literatur yang membahas secara langsung mengenai peran komunitas lokal, komersialisasi budaya, dan pengelolaan pariwisata di kawasan suci, khususnya di Bali; (2) memiliki keterkaitan dengan bidang komunikasi, sosiologi budaya, antropologi, serta kajian pariwisata berkelanjutan; dan (3) tersedia dalam bentuk naskah lengkap, baik artikel jurnal, buku akademik, maupun laporan penelitian sehingga dapat dianalisis secara komprehensif untuk mendukung pemahaman mendalam tentang dinamika komunitas Uluwatu dalam menghadapi komersialisasi pada objek wisata Pura Luhur Uluwatu.

Proses pengumpulan data dalam kajian literatur ini dilakukan dengan menelusuri berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest, dan ResearchGate menggunakan kata kunci seperti “community participation”, “cultural commodification”, “Uluwatu Temple”, “sustainable tourism”, dan “local wisdom in Bali tourism”. Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh sejumlah artikel yang kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitan langsung dengan isu komersialisasi budaya serta peran komunitas lokal. Tahap berikutnya adalah analisis isi (content analysis) yang dilakukan dengan cara membaca secara mendalam, mengelompokkan, serta membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) dinamika komersialisasi dan komodifikasi budaya di Bali, (2) peran dan strategi komunitas Uluwatu dalam menjaga nilai-nilai sakral di tengah tekanan pariwisata, dan (3) upaya pelestarian budaya melalui komunikasi partisipatif dan kearifan lokal. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian (research gap), serta kontribusi teoretis dari literatur yang ada, khususnya terkait bagaimana komunitas lokal berperan dalam menegosiasikan batas antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi komunitas Uluwatu dalam menghadapi komersialisasi serta implikasinya terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan di kawasan suci. Penelitian ini tidak menggunakan data

primer, melainkan sepenuhnya berfokus pada analisis dokumen akademik yang telah dipublikasikan, sehingga dapat direplikasi secara sistematis dengan mengikuti tahapan pencarian literatur yang terstruktur, kriteria seleksi yang terukur, dan teknik analisis konten deskriptif yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Komersialisasi Pariwisata di Kawasan Uluwatu

Pariwisata Bali telah lama menjadi motor utama ekonomi daerah, namun perkembangan pesat di kawasan Uluwatu menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Uluwatu yang terkenal dengan panorama tebingnya serta keberadaan Pura Luhur Uluwatu menjadi daya tarik utama wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Fenomena ini mendorong munculnya berbagai fasilitas wisata seperti kafe, vila, dan tempat hiburan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi (Hermayani dkk., 2025). Namun, di balik kemegahan industri pariwisata tersebut, muncul kekhawatiran terhadap pergeseran makna budaya yang sebelumnya sakral menjadi sekadar komoditas wisata. Fenomena komersialisasi ini menandai adanya transformasi nilai, di mana kegiatan spiritual dan adat diposisikan sebagai atraksi yang dijual kepada wisatawan tanpa memperhatikan kesakralannya (Siti Fatimah dkk., 2025).

Proses komodifikasi budaya di Uluwatu terlihat dari bagaimana berbagai elemen budaya seperti pertunjukan tari Kecak, ritual adat, dan simbol religius dikemas untuk kepentingan pariwisata. Pertunjukan tari Kecak yang awalnya berakar pada tradisi ritual kini menjadi bagian dari agenda wisata harian dengan tiket berbayar dan jadwal pertunjukan yang teratur. Hal ini memang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana bentuk pertunjukan tersebut masih mempertahankan nilai-nilai spiritual yang asli. Menurut Wibawa dkk. (2019), komodifikasi budaya berpotensi menggeser fokus dari nilai kesucian menjadi nilai ekonomi, di mana kebanggaan budaya diukur dari banyaknya kunjungan wisatawan, bukan dari kelestarian makna adat itu sendiri (Neli Susanti dkk., 2023).

Ketegangan antara nilai sakral dan kepentingan ekonomi semakin tampak ketika kegiatan wisata di sekitar Pura Luhur Uluwatu terus meningkat. Sebagai salah satu pura Sad Kahyangan Jagat yang memiliki arti penting dalam sistem keagamaan Hindu di Bali, Pura Luhur Uluwatu semestinya menjadi ruang spiritual yang dilindungi (Irianto dkk., 2023). Namun aktivitas wisata yang tidak terkendali seperti keramaian berlebihan, perilaku wisatawan yang kurang menghormati tempat suci, dan pembangunan fasilitas komersial di sekitar kawasan pura memunculkan kekhawatiran terhadap degradasi kesakralan. Komunitas adat pun sering kali dihadapkan pada dilema antara menjaga kesucian pura dan memanfaatkan potensi ekonomi dari wisatawan. Kondisi ini menggambarkan paradoks antara pelestarian budaya dan tuntutan ekonomi modern yang sulit dihindari (Septiarini dkk., 2024).

Dampak lingkungan akibat tekanan pariwisata juga menjadi perhatian serius di kawasan Uluwatu. Pembangunan infrastruktur wisata yang masif seperti penginapan di tebing, restoran dengan pemandangan laut, serta peningkatan volume

kendaraan wisatawan menyebabkan erosi tanah dan keretakan di beberapa bagian tebing suci di sekitar pura (Zahrani dkk., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap keuntungan ekonomi sering kali mengabaikan aspek ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Seperti dikemukakan oleh Lee dkk. (2017), keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi tetapi juga oleh daya tahan komunitas dalam menghadapi perubahan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas wisata (Wirawan, 2025).

Selain dampak ekologis, komersialisasi juga mempengaruhi struktur sosial dan moral masyarakat Uluwatu. Meningkatnya jumlah wisatawan membawa perubahan gaya hidup yang signifikan terutama bagi generasi muda yang mulai lebih terbuka terhadap gaya hidup modern dan global (Lagunsad dkk., 2022). Nilai-nilai adat seperti gotong royong dan kesederhanaan mulai terkikis oleh pola pikir konsumtif. Ketergantungan terhadap industri pariwisata menjadikan masyarakat cenderung menilai segala sesuatu dari segi keuntungan finansial. Fenomena ini mengancam keberlanjutan budaya lokal karena orientasi ekonomi dapat menggeser nilai-nilai luhur yang telah lama dijaga melalui adat dan tradisi (Astuti dkk., 2025).

Konflik kepentingan antara pelaku pariwisata, investor, dan masyarakat adat menjadi konsekuensi logis dari meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan Uluwatu. Banyak pihak yang berlomba untuk memperoleh keuntungan dari potensi wisata yang ada termasuk dalam pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pura (Edvra & Darmawan, 2023). Beberapa investor membangun fasilitas mewah tanpa mempertimbangkan batas wilayah suci, sementara masyarakat adat harus berjuang menegakkan aturan awig-awig yang mengatur kesucian pura. Ketegangan ini menciptakan polarisasi sosial di antara warga, di mana sebagian memilih mendukung pembangunan demi pendapatan sedangkan sebagian lain menolak karena mengancam nilai spiritual dan keseimbangan lingkungan (Maritza & Fauzan, 2024).

Dalam perspektif ekonomi budaya, komersialisasi pariwisata sebenarnya tidak selalu bermakna negatif selama dilakukan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Kegiatan wisata dapat menjadi sarana pelestarian budaya jika dikelola dengan memperhatikan kearifan lokal dan batas-batas kesakralan (Sodik dkk., 2025). Namun pada kenyataannya, sering kali proses pengelolaan wisata di Uluwatu tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dominasi pihak swasta dan investor luar daerah menyebabkan komunitas lokal kehilangan kontrol atas pengaturan tata ruang dan kegiatan wisata di wilayah mereka. Hal ini memperlemah posisi komunitas adat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dan ekonomi (Indrawati dkk., 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa Uluwatu bukan sekadar destinasi wisata tetapi juga ruang sosial di mana berbagai kekuatan ekonomi, budaya, dan politik saling berinteraksi. Komersialisasi menciptakan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat lokal di mana nilai-nilai tradisional harus dinegosiasikan dengan realitas modernitas (Fawaid & Abdullah, 2024). Pergeseran ini menimbulkan tantangan bagi komunitas adat untuk menemukan strategi baru agar tetap relevan dan berdaya di tengah tekanan globalisasi pariwisata. Upaya mempertahankan identitas budaya di tengah arus komersialisasi membutuhkan kesadaran kolektif dan kemampuan untuk

menegosiasikan nilai-nilai adat dengan kebutuhan ekonomi modern (Ibrahim dkk., 2025).

Selain itu, dinamika komersialisasi juga membawa perubahan dalam bentuk interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan. Interaksi yang pada awalnya bersifat spiritual dan edukatif kini lebih banyak diarahkan pada transaksi ekonomi. Banyak warga yang bekerja di sektor jasa wisata seperti pemandu, penari, dan pedagang suvenir (Dewi & Nulul, 2018). Walaupun hal ini meningkatkan pendapatan ekonomi, namun interaksi sosial yang terbentuk cenderung bersifat sementara dan tidak mendalam. Nilai-nilai keramahtamahan yang semula tulus kini sering kali dimaknai sebagai bagian dari strategi pelayanan wisata, bukan lagi bentuk ekspresi budaya yang autentik (Hermayani dkk., 2025).

Kawasan Uluwatu pada akhirnya menggambarkan wajah ganda dari pariwisata Bali. Di satu sisi menjadi simbol keberhasilan ekonomi daerah, namun di sisi lain menampakkan risiko hilangnya identitas budaya dan degradasi spiritualitas masyarakat (Siti Fatimah dkk., 2025). Komersialisasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketimpangan sosial, menurunkan solidaritas antarwarga, serta memperlemah peran komunitas adat sebagai penjaga nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, memahami dinamika komersialisasi di Uluwatu bukan hanya soal menilai dampak ekonomi tetapi juga menyangkut identitas dan keberlanjutan kebudayaan Bali secara keseluruhan (Neli Susanti dkk., 2023).

Melihat kondisi tersebut, muncul kesadaran bahwa pengelolaan pariwisata di Uluwatu harus diarahkan pada prinsip keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan spiritualitas. Komunitas adat memegang peran strategis dalam mengatur tata kelola wisata yang selaras dengan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Komersialisasi memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikendalikan melalui pendekatan partisipatif, penguatan kelembagaan adat, dan kolaborasi yang sehat antara pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat. Dengan demikian, Uluwatu dapat menjadi contoh nyata bagaimana destinasi suci dapat bertahan di tengah gempuran kapitalisasi pariwisata tanpa kehilangan jati dirinya.

Peran Komunitas Uluwatu dalam Menghadapi Komersialisasi

Komunitas Uluwatu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan tuntutan ekonomi yang timbul akibat komersialisasi pariwisata. Sebagai masyarakat adat yang bernaung di bawah struktur Desa Adat Pecatu, komunitas ini memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam melindungi kesucian kawasan Pura Luhur Uluwatu (Neli Susanti dkk., 2023). Komunitas adat berfungsi sebagai pengatur utama tata ruang, perilaku wisatawan, serta kegiatan ekonomi di sekitar pura melalui sistem hukum adat yang disebut awig-awig. Aturan adat tersebut menjadi dasar dalam menetapkan batas wilayah suci, tata tertib berkunjung, dan mekanisme pembagian hasil ekonomi dari aktivitas wisata. Dengan demikian, komunitas Uluwatu tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi juga pengelola yang aktif dalam memastikan kegiatan pariwisata tetap selaras dengan nilai-nilai budaya lokal (Irianto dkk., 2023).

Struktur sosial masyarakat adat Uluwatu didukung oleh lembaga tradisional seperti bendesa adat, prajuru desa, dan pecalang yang berfungsi menjaga ketertiban di kawasan suci. Peran bendesa adat sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan pariwisata, termasuk dalam mengatur kerja sama dengan pihak pengelola dan investor (Septiarini dkk., 2024). Pecalang, sebagai pengaman adat, turut berperan menjaga perilaku wisatawan agar tidak melanggar kesopanan di area pura. Dalam hal ini, keberadaan komunitas adat menjadi benteng utama yang memastikan aktivitas ekonomi tidak melampaui batas kesucian tempat ibadah. Sistem sosial yang masih kuat dan berlandaskan solidaritas komunal memungkinkan komunitas Uluwatu mempertahankan nilai-nilai religius di tengah arus modernisasi (Zahrani dkk., 2025).

Dalam menghadapi tekanan komersialisasi, komunitas Uluwatu menerapkan berbagai strategi untuk menjaga kesakralan dan nilai-nilai budaya. Salah satu upayanya adalah menetapkan peraturan khusus tentang waktu kunjungan wisatawan agar tidak mengganggu jadwal upacara keagamaan (Wirawan, 2025). Selain itu, setiap pengunjung diwajibkan mengenakan pakaian sopan dan menggunakan kain serta selendang sebelum memasuki kawasan pura sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci. Pengelolaan tiket masuk dan pendapatan dari pariwisata dilakukan secara kolektif oleh lembaga adat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan adat serta pemeliharaan pura. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa komunitas Uluwatu tidak menolak pariwisata, tetapi berusaha mengarahkannya agar tetap menghormati nilai spiritual dan budaya (Lagunsad dkk., 2022).

Komunikasi partisipatif menjadi kunci utama dalam menjaga keselarasan antara masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah daerah. Melalui forum adat, masyarakat Uluwatu rutin melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang muncul akibat aktivitas pariwisata, seperti pelanggaran etika wisatawan atau pembangunan yang melebihi batas (Astuti dkk., 2025). Keputusan yang diambil selalu melalui musyawarah bersama, sehingga setiap warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut Dewi dan Nulul (2018), komunikasi partisipatif semacam ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial warga terhadap pengelolaan kawasan wisata. Dengan komunikasi yang terbuka, komunitas Uluwatu dapat menjaga hubungan harmonis antarwarga sekaligus memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi dari pihak luar.

Selain menjaga nilai budaya, komunitas Uluwatu juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan pura. Kesadaran ekologis diterapkan melalui pelarangan pembuangan sampah sembarangan, pengawasan pembangunan agar tidak merusak struktur tebing, serta pengaturan zona konservasi yang tidak boleh dijadikan lahan komersial (Edvra & Darmawan, 2023). Langkah-langkah ini mencerminkan penerapan filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dengan menjaga lingkungan, komunitas tidak hanya melindungi kawasan suci, tetapi

juga memastikan keberlanjutan daya tarik wisata Uluwatu yang bergantung pada keindahan alamnya (Maritza & Fauzan, 2024).

Kolaborasi antara komunitas adat dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan komersialisasi. Pemerintah Kabupaten Badung bersama tokoh adat Uluwatu menjalin kerja sama dalam pengelolaan pendapatan tiket wisata serta penataan area parkir, jalur masuk, dan fasilitas umum (Sodik dkk., 2025). Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Namun dalam praktiknya, masih sering muncul ketegangan karena adanya perbedaan kepentingan antara kebijakan pembangunan daerah dengan nilai-nilai adat yang dipegang oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip budaya yang dijaga oleh komunitas Uluwatu (Indrawati dkk., 2025).

Upaya mempertahankan identitas budaya di tengah arus komersialisasi juga diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan pelibatan generasi muda. Komunitas Uluwatu aktif melibatkan anak-anak dan remaja dalam kegiatan adat, pelatihan tari tradisional, dan pembelajaran tentang sejarah pura. Langkah ini bertujuan agar generasi muda memahami nilai kesucian dan tanggung jawab mereka dalam melanjutkan tradisi leluhur (Fawaid & Abdullah, 2024). Dengan menanamkan kesadaran budaya sejak dini, masyarakat berharap agar komersialisasi tidak sepenuhnya menguasai pola pikir generasi penerus. Pendidikan budaya menjadi strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan sosial dan spiritual komunitas Uluwatu (Ibrahim dkk., 2025).

Secara keseluruhan, peran komunitas Uluwatu dalam menghadapi komersialisasi pariwisata menunjukkan adanya keseimbangan antara adaptasi dan perlindungan nilai. Mereka tidak menolak perkembangan ekonomi yang dibawa oleh industri wisata, tetapi berusaha menegosiasikannya melalui kerangka adat dan kearifan lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan, komunikasi partisipatif, dan kolaborasi lintas pihak menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni antara tradisi dan modernitas. Dengan landasan spiritual yang kuat serta rasa memiliki terhadap warisan budaya, komunitas Uluwatu berhasil menunjukkan bahwa pariwisata dapat berkembang tanpa harus mengorbankan identitas budaya dan kesucian tempat suci.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulannya, komersialisasi pariwisata di kawasan Uluwatu membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, pariwisata memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat melalui lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, namun di sisi lain, muncul ancaman terhadap nilai-nilai spiritual, kesakralan pura, serta kelestarian lingkungan. Komunitas Uluwatu menunjukkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian budaya, melalui penerapan awig-awig, pengelolaan kolektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam

pengawasan kegiatan wisata. Sinergi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku pariwisata menjadi kunci dalam menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, masa depan pariwisata Uluwatu harus diarahkan pada keseimbangan antara aspek spiritual, ekonomi, dan ekologis agar identitas budaya Bali tetap lestari di tengah arus globalisasi dan komersialisasi yang terus berkembang.

Saran

1. Pemerintah Daerah
Perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas wisata agar keseimbangan antara nilai budaya, ekonomi, dan lingkungan tetap terjaga.
2. Komunitas Adat Uluwatu
Harus mempertahankan peran aktif dalam menegakkan awig-awig serta menjaga kesucian kawasan pura dari tekanan komersialisasi.
3. Pelaku Pariwisata dan Investor
Sebaiknya mengutamakan prinsip tanggung jawab sosial dan menghormati nilai-nilai budaya lokal dalam setiap kegiatan usaha.
4. Wisatawan
Diharapkan menghormati adat istiadat setempat dan menjaga perilaku saat berkunjung ke kawasan suci Uluwatu.
5. Lembaga Pendidikan dan Peneliti
Perlu terus mengembangkan kajian dan edukasi mengenai pelestarian budaya serta dampak komersialisasi terhadap masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. W., Anggraini, C., Putra, D. K. S., & Warasenda, S. A. P. V. Y. (2025). Komunikasi digital untuk Karang Taruna Kelurahan Taman Sari Bandung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(5), 1919–1926.
- Dewi, M., & Nulul, N. A. (2018). Komunikasi partisipatif masyarakat industri dalam mendukung branding Kota Madiun. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 75–90. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1340>
- Edvra, P. A., & Darmawan, J. J. (2023). Komersialisasi sewa Mux di TVRI Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 37–56.
- Fawaid, A., & Abdullah, A. (2024). Desa cerdas ramah gender: Analisis penerapan sertifikasi halal dan komersialisasi produk bagi pelaku UMKM perempuan. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(2), 116–142.
- Hermayani, A., Apriliyani, R., Yandasari, P., Nurdhatilah, A., & Purwanto, E. (2025). Komodifikasi budaya dalam media dan tantangannya bagi keberlanjutan sosial. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(3), 16.
- Ibrahim, M. M., Rifad, D. M., Purwanto, E., Purnama, C., & Maulidan, R. A. (2025). Budaya dalam era media sosial: Studi pada komunitas tradisional di Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(3), 13.
- Indrawati, I., Ariyanti, M., & Dewi, C. K. (2025). Jejak digital masjid: Meningkatkan peran sosial DKM lewat website dan konten. *Madaniya*, 6(3), 1236–1243.

- Irianto, W. S. G., Widiyaningtyas, T., Sujito, S., Habibi, M. A., Syah, A. I., Abdul Hadi, A., & Fuadi, A. (2023). Digitalisasi produk UMKM berbasis e-katalog untuk meningkatkan komersialisasi pemasaran di lingkungan komunitas UMKM PADUKA. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 153–161.
- Lagunsad, K. M., Bremanda, M., & Susanto, S. S. (2022). Analisis masalah komersialisasi eco enzyme pada Komunitas Eco Enzyme Nusantara. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(2), 249–300.
- Maritza, K., & Fauzan, L. A. (2024). Komunikasi partisipatoris Komunitas Eco Enzyme Nusantara dalam memberdayakan masyarakat. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8312–8320.
- Mudana, I. G. A. M. G. (2018). Eksistensi pariwisata budaya Bali dalam konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 8(2), 61–68. <https://doi.org/10.22334/jihm.v8i2.139>
- Neli Susanti, N., Elfira, R., Nurdianah, S. K., Juliansyah, M. R., Anuwar, K., & Firmansah, A. (2023). Da'wah dan komunikasi di era masyarakat 5.0: Aspek kewirausahaan sebagai media dakwah. *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies*, 2(1), 62–67.
- Septiarini, S., Priyanto, P., Nurmallasari, N., & Wardani, G. K. (2024). Marketing communication strategy analysis in the Non-Transport Commercialization Unit (KNA) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Operational Area 7 Madiun. *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran dan Kesekretariatan*, 8(2), 1–9.
- Siti Fatimah, S., Wibowo, W., Irfaniah, N. R., Harahap, R. A., & Panggabean, N. A. (2025). Local digital ecosystem: Peran komunitas digital dalam mendorong bisnis kreatif daerah. *JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital*, 4(1), 127–136.
- Sodik, J., Putri, V. U. G., & Albar, Y. M. (2025). Strategi komersialisasi produk tugas akhir mahasiswa fashion berbasis wastra Nusantara melalui pendekatan design thinking: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3394–3402.
- Wibawa, I. P. S., Samekto, F. X. A., & Gelgel, I. P. (2019). Determination of the sacred space Uluwatu Temple with the GIS approach. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 954–958.
- Wirawan, P. (2025). Pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Ubud: Antara komersialisasi dan pelestarian budaya. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 30(2), 249–262.
- Zahrani, I. P., Purwanto, E., Ardiyanti, N., Lusiyanti, S., & Riani, A. E. (2025). Media sebagai alat penguatan budaya lokal di tengah arus globalisasi. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 2(3), 13.